

## Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung)

Nrangwesthi Widyaningrum, Muhammad Sarip Kodar, Risma Suryani Purwanto,  
Agung Priambodo, Ifad Fadlurrahman

Program Studi Manajemen Bencana, Universitas Pertahanan, Bogor  
Email : [wrrangwesthi@gmail.com](mailto:wrangwesthi@gmail.com)

Diterima 15 Desember 2019, Direvisi 15 Mei 2020, Disetujui Publikasi 30 Juni 2020

### Abstract

*Indonesia has the most complete types of disasters in the world such as floods, landslides, tidal waves, tornadoes, drought, forest and land fires, earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, liquefaction and many more. Natural disasters that occur in Indonesia often just happen and it is not predictable when it will happen. This causes problems in handling natural disasters. Natural disaster management is not a matter of BNPB or BPBD, one important element is the involvement of the Indonesian National Army (TNI). One of Indonesia's regions that are vulnerable to natural disasters is Lampung Province. This research will describe how the role of the TNI in the case study in Korem 043 / Gatam in helping to overcome natural disasters in Lampung Province. The research method used in this research is qualitative research with a literature study approach. The role of the TNI in disaster management in Lampung Province is inseparable from the duties and functions of the TNI that have been mandated in Law Number 34 of 2004. Korem 043 / Gatam has taken strategic steps both from the pre-disaster, disaster response, and post-disaster phases . TNI involvement in the process of disaster management does not stand alone, but cooperates and synergizes with local governments.*

**Keywords:** Disaster Management, Korem, Lampung, Natural Disasters, The Role of the TNI

### Abstrak

*Indonesia memiliki jenis bencana terlengkap di dunia seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, liquifaksi dan masih banyak lagi. Bencana alam yang terjadi di Indonesia sering kali terjadi begitu saja dan tidak terprediksi kapan akan terjadi. Hal ini menyebabkan persoalan dalam penanganan bencana alam. Penanggulangan bencana alam bukan masalah BNPB atau BPBD saja, salah satu elemen pentingnya adalah adanya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana alam adalah Provinsi Lampung. Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana peran TNI studi kasus di Korem 043/Gatam dalam membantu penanggulangan bencana alam yang ada di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literature. Peran TNI dalam penanggulangan bencana di Provinsi Lampung tidak lepas dari tugas dan fungsi TNI yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Korem 043/Gatam telah melakukan langkah-langkah strategis baik dari proses pra bencana, tanggap bencana, dan fase pasca bencana. Keterlibatan TNI dalam proses penanggulangan bencana tidak berdiri sendiri, namun bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah daerah.*

**Kata Kunci :** Bencana Alam, Korem, Lampung, Penanggulangan Bencana, Peran TNI

## A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia kini sudah tidak asing lagi dengan kata bencana alam. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan letak geografis pada pertemuan tiga lempang bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia menyebabkan posisi negara labil, mudah bergeser dan rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan longsor. Secara geografis Indonesia berada di posisi *Ring of Fire* dimana 187 gunung api membentang dari barat ke timur.

Posisi geografis Indonesia juga ditandai dengan berbagai gejala cuaca dan perubahan iklim yang dinamis, sehingga menyebabkan Indonesia rawan bencana alam seperti badai, topan, siklon tropis, dan banjir (Husein, 2014). Oleh karena itu Indonesia cocok disebut dengan laboratorium bencana seperti yang diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo pada Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan 2019 di Bogor karena Indonesia memiliki jenis bencana terlengkap di dunia seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, liquifaksi dan masih banyak lagi.

Bencana alam yang terjadi di Indonesia sering kali terjadi begitu saja dan tidak terprediksi kapan akan terjadi. Hal ini menyebabkan persoalan dalam penanganan bencana alam. Dahulu penanganan bencana alam terfokus pada kejadian sesaat setelah terjadi bencana yaitu hanya merespon keadaan darurat bencana saja. Penanganan bencana yang bersifat responsive ini dinilai tidak efektif untuk mengurangi resiko bencana.

Berjalan dari pandangan konvensional ini berkembanglah ke pandangan yang lebih progresif yang melihat bencana merupakan bagian dari pembangunan. Oleh karena itu dilakukan pengintegrasian antara program pembangunan dan penanggulangan

bencana. Pandangan progresif berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan alam dan sosial.

Berkembangnya pengetahuan mendorong timbulnya pandangan bahwa bencana adalah merupakan proses geofisik, geologi dan hidrometeorologi yang dapat mempengaruhi lingkungan fisik dan membahayakan kehidupan manusia. Berdasarkan pandangan ini paradigma yang berkembang adalah mitigasi, dimana fokus penanggulangan bencana diarahkan pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya dengan meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan yang terjadi akibat adanya kejadian alam (Husein, 2014).

Salah satu wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana alam adalah Provinsi Lampung. Secara geografis Provinsi Lampung berada di ujung selatan Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Pulau Jawa (Bappenas, 2006) dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan selat Sunda yang didalamnya terdapat gunung anak Krakatau memiliki histori yang panjang terkait kebencanaan. Bencana yang tercatat pernah terjadi di Provinsi Lampung diantaranya seperti Gempa Bumi 1699, Letusan Gunung Krakatau tahun 1883, Gempa Bumi Liwa tahun 1994, Tsunami Selat Sunda 2018, dan masih banyak lagi.

Dalam rangka penanggulangan bencana alam yang terjadi di Provinsi Lampung diperlukan suatu sinergi, koordinasi, komunikasi, dan langkah-langkah terencana oleh berbagai pihak, baik itu BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, Ormas, LSM, akademisi, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.

Penanggulangan bencana alam bukan masalah BNPB atau BPBD saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua pihak atau yang dikenal dengan pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Pemerintah disini termasuk

didalamnya adalah keterlibatan militer seperti TNI AD, TNI AL maupun TNI AU dengan seluruh jaringan komando yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring perubahan paradigma yang terjadi diperlukan suatu upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh semua komponen bangsa sesuai peran dan fungsi masing-masing yang meliputi upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan fase pemulihan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir korban yang disebabkan karena adanya bencana terjadi.

Keterlibatan TNI dalam proses penanggulangan bencana alam sejalan dengan pasal 7 Undang-Undang RI No.34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI yaitu Operasi Militer Selain Perang (OMSP), diantaranya adalah membantu penanggulangan bencana alam baik pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterlibatan TNI ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya kerugian, baik jiwa maupun harta benda rakyat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa yang dilaksanakan melalui kemampuan pembinaan teritorial dan dukungan (Widodo, 2014). Selain itu, TNI merupakan institusi paling solid yang dapat melakukan pertolongan pertama khususnya pada penyelamatan korban (Adril, 2011).

Oleh karena itu peran TNI khususnya di wilayah Korem 043/Gatam dalam penanggulangan bencana alam di Provinsi Lampung sangat penting sekali, sebab TNI mempunyai kapasitas dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas kondisi darurat dengan jaringan komandonya sampai ke tingkat daerah. Untuk itu, penelitian ini akan menjabarkan bagaimana peran TNI khususnya Korem 043/Gatam dalam membantu penanggulangan bencana alam yang ada di Provinsi Lampung.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dipertimbangkan dari masalah sosial dan atau kemanusiaan dari individu atau sekelompok individu (Cresswell, 2009). Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut (Wahidmurni, 2017).

Metode pengumpulan data dan analisis dalam metode penelitian kualitatif berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian. Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 20-22 November 2019 di Provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada pejabat TNI di Korem 043/Gatam, observasi, dan dokumentasi.

Tahap pertama adalah mengidentifikasi Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan bencana alam yang sudah dilakukan sejauh ini, kemudian menganalisis peran-peran tersebut dengan mengumpulkan data menggunakan metode penyelidikan partisipatif dan wawancara mendalam sebagai data primer. Pemilihan narasumber menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Korem 04/Gatam. Data sekunder diambil dari berbagai literature seperti laporan kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Korem 043/Gatam, jurnal, buku, internet,

dan berbagai sumber sastra dari lembaga yang diteliti untuk mendukung informasi data yang diperoleh dari hasil wawancara.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Teori Peran

Peran menunjukkan sekelompok konsep yang dihubungkan bersama-sama kedalam satu kata. Peran merupakan suatu bagian karakter-karakter yang dilakukan oleh seorang aktor dalam sebuah drama, suatu bagian tersebut diambil atau diasumsi oleh setiap orang (Brink & Wood, 1994). Teori peran (*role theory*) merupakan teori yang menggabungkan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Kata peran diambil dari dunia theater, dimana aktor bermain sebagai tokoh tertentu dan berperilaku tertentu.

Teori peran juga menggambarkan bagaimana interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa tugas dan fungsinya dalam lingkungan sosial budaya. Seseorang mempunyai peran tertentu, misalnya sebagai polisi, guru, siswa, orangtua, wanita, dan lain-lain, dengan ini diharapkan supaya orang-orang yang mempunyai peran tersebut berperilaku sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Mengapa orang tersebut harus mengajar kepada siswa di kelas, karena dia adalah seorang guru. Jadi karena statusnya guru, maka dia harus mengajarkan materi kepada siswa dan perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosialnya (Hutami, 2011).

Secara umum peran bisa didefinisikan sebagai *expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*. Perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan ada dua jenis, yaitu *role perception* dan *role expectation*. *Role perception* adalah persepsi yang diharapkan seseorang tentang cara orang itu berperilaku, dan *role expectation* adalah cara orang lain menerima sikap dan perilaku seseorang

dalam situasi tertentu. Dalam suatu organisasi, peran yang dimainkan seseorang akan membentuk suatu komponen dalam hal identitas serta kemampuan orang untuk bekerja. Jadi, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran telah terdefiniskan dengan jelas (Syahri, 2018).

#### 2. Peran TNI secara Umum

TNI atau Tentara Nasional Indonesia adalah bagian dari rakyat yang dipersiapkan secara khusus guna melaksanakan tugas negara serta bangsa dan bertugas dalam memelihara pertahanan dan keamanan nasional (Chalim & Farhan, 2015). Peran dan kedudukan TNI tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 dijelaskan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik negara.

Fungsinya TNI adalah sebagai penangkal untuk setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari luar maupun dari dalam negeri yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Kemudian juga berfungsi sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam melaksanakan tugas TNI baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) adalah sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas pokok TNI ini dilakukan dengan cara:

- a. operasi militer untuk perang
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
  - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
  - 3) Mengatasi aksi terorisme;
  - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
  - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
  - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
  - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
  - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
  - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
  - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap

pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

### 3. Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam

(Studi Kasus : Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung) Bencana menurut UNISDR (2002) merupakan gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri. Sehingga diperlukan suatu kegiatan yang menyeluruh dalam mengatasi hal ini, agar tidak terjadi korban yang lebih banyak dan meluas. Kegiatan penanggulangan bencana meliputi seluruh aspek dari tahap sebelum terjadi bencana seperti mitigasi, kesiapsiagaan dan pencegahan, saat terjadi bencana atau tanggap bencana dan pemulihan setelah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 menganut prinsip seperti cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya BNPB atau BPBD saja, akan tetapi semua pihak, baik dari pemerintah, militer (TNI), akademisi, media, dunia usaha, dan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi *chaos*. Komponen penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia salah satunya adalah adanya keterlibatan TNI tanpa mengesampingkan pihak atau lembaga lain yang berwenang dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan TNI dianggap penting karena TNI mempunyai anggota yang solid, dan

memiliki satuan anggota sampai tingkat terkecil dalam suatu daerah.

Keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana dan pemberian bantuan kemanusiaan juga bertujuan untuk mencegah semakin besarnya kerugian, baik materiil maupun non materiil serta dapat membantu dalam mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menyebabkan hal-hal yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Dalam penanggulangan bencana, TNI menjalankan tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang RI No.34 tahun 2004. Peran TNI dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud kontribusi dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan nasional serta menjaga ketahanan dari berbagai ancaman dan tantangan dari alam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Dulkadir, Armawi, & Hadmoko, 2014).

Peran aktif TNI pada satuan korem 043/Gatam dalam penanggulangan bencana di Provinsi Lampung merupakan salah satu wujud kepedulian dan dukungan kepada pemerintah. Dalam penanggulangan bencana TNI ikut serta baik dalam tahap mitigasi, proses tanggap darurat, dan proses pemulihan pasca bencana.

Peran TNI dalam tahap mitigasi bencana di Provinsi Lampung dilakukan dengan mempersiapkan infrastruktur serta mempersiapkan sumberdaya manusia agar meminimalisir akibat dari adanya bencana. Mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana atau mengurangi dampak bencana (Kendra & Watchendorf, 2004). Mitigasi bencana merupakan upaya penanganan sebelum terjadi bencana (Subiyantoro, 2010).

Mitigasi merupakan suatu tindakan preventif yang bertujuan guna meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh bencana yang berpotensi terjadi. Provinsi Lampung sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap potensi bencana alam, untuk itu satuan tugas baik

itu TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU dipersiapkan dalam membantu setiap tahapan penanggulangan bencana.

TNI memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya terjadinya bencana dan langkah-langkahantisipasi apabila terjadi bencana hal ini dilakukan dalam rangka mitigasi mempersiapkan sumber daya manusia. Penyuluhan yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi kebencanaan dalam wilayah masing-masing, karena daerah-daerah yang ada di Provinsi Lampung tidak dipungkiri memiliki kerentanan bencana yang berbeda satu dengan yang lainnya. Penyuluhan ini menjadi penting karena kesiapsiagaan masyarakat dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat menjadi dasar utama untuk menambah kapasitas masyarakat guna meminimalisir korban jiwa akibat kurangnya pengetahuan masyarakat.

Pengetahuan menjadi penting karena dengan pengetahuan masyarakat menjadi tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat lainnya yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan gerakan masyarakat untuk ramah terhadap lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan melakukan gerakan penghijauan bersama masyarakat. Selain itu juga menginisiasi pembentukan taruna siaga bencana (tagana) pada tiap desa yang berpotensi terhadap bencana dengan pendampingan pelatihan oleh babinsa setempat. Mitigasi lainnya yang dilakukan adalah dengan mempersiapkan infrastruktur guna meminimalisir dampak bencana.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan diantaranya adalah membuat tempat berkumpul/ titik kumpul yang aman bagi masyarakat apabila terjadi bencana, membuat *early warning system* secara sederhana dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada sehingga bisa mendeteksi awal apabila terjadi bencana. Kegiatan mitigasi yang dilakukan Korem 043/Gatam dalam penanggulangan

bencana diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kebiasaan yang salah sehingga dapat dihindari terjadinya bencana yang timbul dari kecerobohan masyarakat.

Fase tanggap darurat bencana, TNI tidak lepas untuk turut ikut serta dalam penanggulangan bencana. Meski upaya-upaya mitigasi telah dilakukan, ketika terjadi bencana masih saja di lapangan sering terjadi permasalahan dalam proses tanggap daruratnya. Tidak dipungkiri, dalam fase tanggap darurat bencana baik itu TNI AD, TNI AU ataupun TNI AL memainkan peranan yang cukup penting. Hal ini ditunjukkan dengan peran-peran yang dilakukan oleh TNI dalam fase tanggap darurat, khususnya dalam fase tanggap darurat yang terjadi di Provinsi Lampung. TNI memiliki peranan untuk membantu pencarian korban bencana dengan tetap berkoordinasi dengan instansi dan badan terkait.

Evakuasi menjadi salah satu hal pokok yang menjadi sangat penting karena bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari lokasi bencana dan menghindarkan jatuhnya masyarakat lebih banyak lagi. TNI biasanya menjadi pihak pertama yang datang pada lokasi bencana untuk memberikan pertolongan dan mencari korban akibat terjadi bencana alam. Logistik baik berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal sementara merupakan elemen penting dalam fase tanggap darurat. Kenyataannya di lapangan adalah keberadaan bantuan dari berbagai pihak tidak tepat sasaran, tidak terdistribusi dengan baik, dan seringkali terjadi *chaos*.

Kondisi ini yang menyebabkan timbulnya kerentanan terkait dengan kecurigaan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, maka TNI memainkan peranannya untuk mencegah semakin kacanya distribusi logistik yang ada pada fase tanggap darurat dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, kegiatan selanjutnya yang dilakukan TNI pada fase tanggap darurat adalah

membantu mendirikan dapur umum dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, membantu memperbaiki infrastruktur vital yang rusak dengan mengerahkan alat dan perlengkapan yang dimiliki, kemudian membantu menyalurkan bantuan terhadap korban yang membutuhkan agar bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak terjadi penyimpangan, serta membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kantung-kantung pengungsian dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki oleh korem. Korem 043/Gatam bisa memaksimalkan peralatan yang dimiliki saat fase tanggap darurat serta mendata semua peralatan yang ada di wilayah sehingga apabila terjadi bencana akan mudah dalam pengerahannya.

Fase pasca bencana pun tidak lepas dari peran TNI. Dalam proses penanggulangan bencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menjadi salah satu tanggung jawab yang cukup berat bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya untuk memulihkan kondisi fisik maupun kondisi psikis dari masyarakat yang terkena musibah akibat bencana. Oleh sebab itu, proses pemulihan baik fisik maupun kondisi psikologis, serta rehabilitasi-rekonstruksi menjadi sangat penting dalam fase tanggap darurat bencana (Fauzi, 2014).

Korem 043/Gatam dalam fase pasca bencana berperan melakukan upaya-upaya seperti membantu menyediakan tenaga medis guna memberikan pengobatan kepada masyarakat, membantu menyiapkan tenaga psikiater guna memulihkan kondisi psikologis masyarakat terdampak bencana agar dapat pilih kembali. Membantu memberikan tenaga pengajar untuk anak-anak yang terdampak bencana, membantu memperbaiki sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana yang terjadi agar dapat segera bisa digunakan oleh

masyarakat, serta mengadakan kegiatan yang bersifat menghibur atau membangkitkan mobilitas bagi masyarakat terdampak bencana. Semua hal ini dilakukan dalam membantu Pemerintah Daerah terkait juga untuk mengatasi trauma yang dialami masyarakat sehingga roda perekonomian dan kehidupan masyarakat bisa segera normal kembali.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Peran TNI dalam penanggulangan bencana di Provinsi Lampung tidak lepas dari tugas dan fungsi TNI yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Korem 043/Gatam telah melakukan langkah-langkah strategis baik dari proses pra bencana, tanggap bencana, dan fase pasca bencana. Keterlibatan TNI dalam proses penanggulangan bencana tidak berdiri sendiri, namun bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Peran Korem 043/Gatam dalam penanggulangan bencana alam di Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan manajemen bencana dengan memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah mulai dari proses sebelum bencana (pra bencana), pada saat tanggap bencana, dan pasca bencana. Kegiatan yang dilakukan berupa bakti TNI kepada masyarakat seperti memberi sosialisasi maupun komunikasi social atau membrikan bantuan secara langsung pada saat bencana terjadi.

Saran yang perlu ditindaklanjuti kedepannya adalah untuk menetapkan strategi dalam penanggulangan bencana mulai dari merumuskan legislasi terkait sinergi sipil dan militer, merumuskan prosedur tetap dalam penanggulangan bencana antara Korem dan Pemerintah Daerah.

#### **Daftar Pustaka**

- Adril. (2011). *Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 032/Wirabraja Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Barat)*. [Thesis]. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Bappenas. (2006). *Draf Final Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025*. Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung.
- Brink, P. J., & Wood, M. J. (1994). *Basic Steps in Planning Nursing Research : From Question to Proposal*. One Exeter Plaza: Jones & Bartlett Publisher, Inc.
- Chalim, M. A., & Farhan, F. (2015). Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.1*, 102-110.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design Edisi 4 (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- CNN Indonesia. (2019). *Kepala BNPB Tak Mau Indonesia Disebut Supermarket Bencana. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190618164205-20-404336/kepala-bnpb-tak-mau-indonesia-disebut-supermarket-bencana> pada tanggal 10 Desember 2019*.
- Dulkadir, Armawi, A., & Hadmoko, D. S. (2014). Optimalisasi Peran Kodim dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kodim 0614 Kota Cirebon, Jawa Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional Volume 22 Nomor 1*, 94-112.

- Fauzi, L. M. (2014). Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IV Nomor II*, 127-136.
- Husein, R. (2014, Juni 25). *Bencana di Indonesia dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana*. Retrieved from Master of Government Affairs and Administration UMY: <http://mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/BENCANA-DI-INDONESIA-DAN-PERGESERAN-PARADIGMA-PENANGGULANGAN-BENCANA-CATATAN-RINGKASAN.pdf>
- Hutami, G. (2011). *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*. [Skripsi]. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Kendra, J., & Watchendorf, T. (2004). Creativity and Coordination in Disaster Management. *Proceeding of the 4th Workshop for Comparative Study on Urban Earthquake Disaster Management*, (p. 78). Kobe, Jepang.
- Subiyantoro. (2010). Selayang Pandang Tentang Bencana. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana. Volume 1 Nomor 45*, 43-46.
- Syahri, M. A. (2018). Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 3, Nomor 1*, 1-26.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- UNISDR. (2002). *United Nations International Strategy For Disaster Reduce*.
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Widodo, B. (2014). *Konsepsi Tugas TNI dalam Penanganan Bencana*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/bambangsixnal/54f9304ca333116f068b485a/konsepsi-tugas-tni-dalam-penanganan-bencana#:~:targetText=Hukumsebagai%20landasanyang%20mendasari%20adalah%20Undang%20E2%80%93%20undang,terhadap%20keutuhan%20bangsa%20dan%20negara>